

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman potensial bagi upaya pembangunan berkelanjutan. Dari tahun ke tahun kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada kebakaran hebat tahun 2015, 2,6 juta Ha lahan di Indonesia terbakar. Jumlah ini memang turun pada tahun 2016, karena bahan bakaran yang sudah menipis dan kondisi iklim yang tidak lagi anomali, namun kebakaran kembali meningkat pada tahun - tahun setelahnya, dimana puncaknya terjadi pada tahun 2019, dengan luas kebakaran lebih dari 1,6 juta Ha (Sipongi KLHK, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan baik dari segi ekonomi, ekologis maupun politik, misalnya gagalnya tujuan pengelolaan hutan lestari atau tidak terpenuhinya persyaratan ekolabel. Secara ekonomis kebakaran hutan telah menimbulkan kerugian berupa rusaknya sumberdaya hutan, penurunan potensi hasil kayu dan non kayu yang merupakan modal dasar untuk pembangunan nasional. Selain itu kebakaran hutan juga dapat menurunkan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam hayati beserta ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, yakni melalui berkurangnya keanekaragaman jenis flora dan fauna sebagai sumber plasma nutfah, menurunnya kualitas tanah, berubahnya fungsi hidrologis serta terjadinya pemanasan global akibat lepasnya gas rumah kaca. Kerugian lain yang sangat penting secara politis adalah berupa polusi asap yang mengganggu lingkungan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dirasakan oleh negara - negara tetangga (Wasis, 2006).

Dilihat dari persepsi dan pendapat masyarakat yang berkembang, tentang peristiwa kebakaran yang sering terjadi belakangan ini adalah bahwa kebakaran tersebut terjadinya di dalam hutan semata, padahal sesungguhnya peristiwa tersebut dapat saja terjadi di luar kawasan hutan terutama lahan-lahan masyarakat atau lahan tak bertuan. Seharusnya kebakaran hutan dan lahan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengendaliannya. Kebakaran hutan di Indonesia pada saat ini dapat dipandang sebagai peristiwa bencana regional dan global. Hal ini disebabkan karena dampak dari kebakaran hutan sudah menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO₂) berpotensi menimbulkan pemanasan global (Adinugroho *et al.*, 2005)

Pembakaran dilakukan oleh pihak - pihak tertentu untuk pembukaan lahan pada kawasan hutan atau lahan milik untuk dijadikan kebun dan peruntukan lain. Mereka melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar karena murah dan dapat menyuburkan tanah, sehingga tidak perlu menyediakan kapur dan pupuk (Wasis, 2006). Praktek pembukaan lahan dengan cara membakar telah menjadi kebiasaan masyarakat dan malah telah menjadi tradisi dan budaya, seperti budaya behumo dan biduk sayak di Melayu Jambi.

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang menyumbang kebakaran cukup besar. Berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 sampai tahun 2020, Provinsi Jambi menduduki peringkat 9 kebakaran terluas di Indonesia, dan berada pada peringkat 3 di wilayah Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau yakni dengan luasan terbakar sebesar 183.197,5 Ha (Sipongi KLHK, 2020). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi pada lahan gambut namun juga terjadi banyak di lahan mineral.

Kabupaten Batang hari termasuk salah satu kabupaten yang rawan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi. Kabupaten ini menempati urutan ke 4 sebagai kabupaten yang tinggi kejadian kebakaran hutan dan lahan dan menempati posisi pertama sebagai kabupaten yang memiliki ekosistem non gambut atau tanah mineral yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran tanah mineral menyebabkan matinya flora dan fauna, kerusakan habitat satwa, menurunnya jasa lingkungan, hilangnya bahan organik, matinya binatang tanah, timbulnya erosi dan perubahan iklim mikro (Wasis, 2006). Hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati akibat kebakaran hutan dan lahan juga sangat menimbulkan kerugian, beberapa jenis flora dan fauna yang di lindungi undang-undang banyak yang mati akibat kebakaran hutan dan lahan. Seperti contoh kasus, hilangnya beberapa jenis anggrek alami dan rusaknya habitat anggrek di desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi serta rusaknya habitat pohon Bulian di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin di Kabupaten Batang Hari akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 silam.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kawasan lindung dan kawasan konservasi yang ada di kabupaten Batang Hari meliputi : Taman Nasional Bukit Duabelas, Cagar Alam Durian Luncuk II, Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin, Taman Hutan Raya Bukit Sari, Restorasi Ekosistem Hutan Harapan dan beberapa kawasan lindung yang terdapat dalam konsesi hutan produksi dan perkebunan.

Tabel 1. 1. Data Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi di Kab. Batang Hari

No	Kawasan Lindung/Kawasan Konservasi	Wilayah Adminstrasi	Luas (Ha)
1	Taman Nasional Bukit 12	Kec. Bathin XXIV, Maro Sebo Ulu	35.292,88
2	Cagar Alam Durian Luncuk II	Kec. Bathin XXIV	41,43
3	Taman Hutan Raya Bukit Sari	Kec. Maro Sebo Ulu	300
4	Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin	Kec. Muara Bulian, Muara Tembesi, Bajubang	15.830
5	Kawasan Restorasi Ekosistem (PT. Reki)	Kec. Bajubang	46.385

Sumber data : BKSDA Jambi

Pada tahun 2019 kawasan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin di Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Muara Bulian dan kawasan hutan PT. Restorasi Ekosistem Hutan Harapan di Kecamatan Bajubang merupakan kawasan yang mengalami kebakaran hebat. Hampir Sebagian besar luas Tahura Sultan Thaha Syaifudin mengalami kebakaran dan sampai mengakibatkan korban jiwa, satu orang anggota Manggala Agni Daops Sumatera X/ Muara Bulian meninggal saat melakukan upaya pemadaman di kawasan Tahura Sultan Thaha Syaifudin ini. Selain itu kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas di Kecamatan Maro Sebo Ulu juga mengalami kebakaran yang luas akibat kebiasaan Suku Anak dalam yang melakukan pembakaran dalam membuka lahan. Tentu saja dampak ekologi yang ditimbulkan sangat merugikan kita semua. Kabupaten Batang Hari sendiri memiliki kekayaan hayati berupa tanaman dan satwa endemik yang harus dilindungi dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Berikut beberapa Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi Undang-Undang, yang terdapat di wilayah kabupaten Batang Hari:

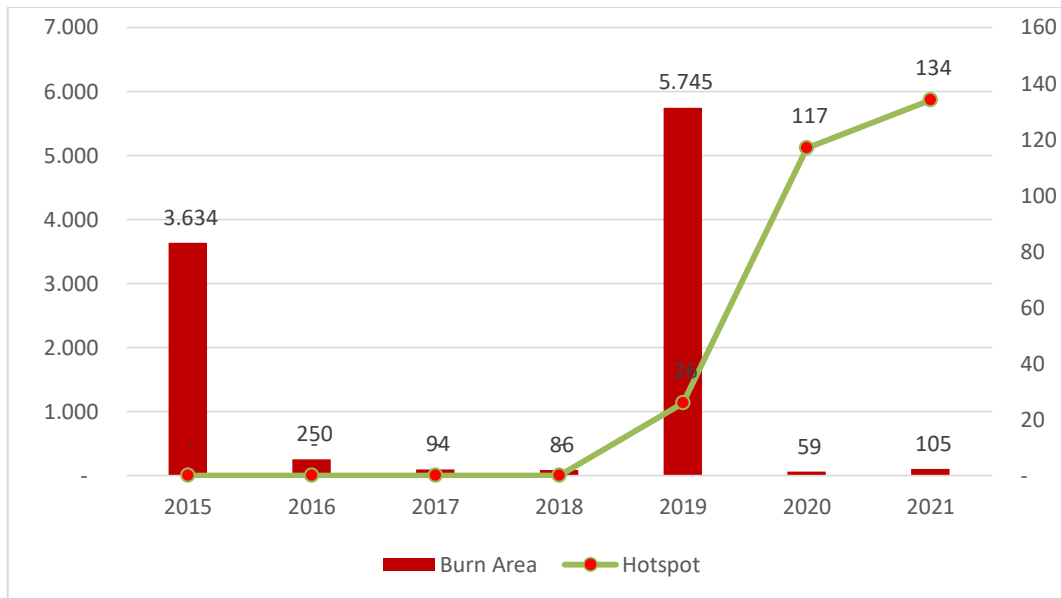
Tabel 1. 2. Keanekaragaman Hayati berupa Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam appendix 2 CITES yang terdapat di Kabupaten Batang Hari

No	Nama Daerah	Nama Latin
1	Anggrek	<i>Acriopsis sp</i>
2	Anggrek	<i>Arachnis sp</i>
3	Anggrek	<i>Bulbophyllum sp</i>

No	Nama Daerah	Nama Latin
4	Anggrek	<i>Bulbophyllum sp</i>
5	Anggrek	<i>Bulbophyllum sp</i>
6	Anggrek	<i>Cymbidium sp</i>
7	Anggrek	<i>Trixpermum anceps</i>
8	Anggrek	<i>Trixpermum sp</i>
9	Anggrek	<i>Calanthe sp</i>
10	Anggrek	<i>Pomatocalpa latifolia</i>
11	Kantong semar	<i>Nepenthes sp</i>
12	Bangau Tong-Tong	<i>Leptoptilos javanicus</i>
13	Enggang badak	<i>Buceros rhinoceros</i>
14	Enggang papan	<i>Buceros bicornis</i>
15	Beruang Madu	<i>Helarctus malayanus</i>
16	Rusa sambar	<i>Rusa unicolor</i>
17	Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus sumatranus</i>
18	Harimau sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>
19	Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>
20	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>
21	Siamang	<i>Symphalangus syndactylus</i>
22	Senyulong	<i>Tomistoma schlegelii</i>
23	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>

Sumber data : BKSDA Jambi

Kebakaran hutan dan lahan berdampak besar bagi manusia baik materiil maupun imateriil. Pemerintah sendiri telah berupaya keras menyelesaikan permasalahan ini baik melalui dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, maupun dukungan pendanaan (Supriyanto *et al*, 2018). Pasca kejadian Kebakaran Hutan dan lahan 2015, di Provinsi Jambi telah dibentuk Satuan Tugas (satgas) penanganan karhutla. Komandan Satuan Tugas adalah Gubernur Jambi dan selaku Ketua Harian Satgas di pegang oleh Komandan Resort Militer (Danrem) 042/Garuda Putih dan didukung oleh seluruh *Stakeholder* baik Pemerintah maupun swasta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun keadaan dilapangan kejadian ini masih berulang sepanjang tahun. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Batang Hari pada khususnya telah membuka mata seluruh pihak akan seriusnya ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Dampak kebakaran hutan dan lahan dirasakan langsung seluruh elemen masyarakat yang terpapar terutama oleh bencana kabut asap.



Gambar 1. 1. Grafik Luas Karhutla dan Jumlah Hotspot di Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 – 2021 (Sumber data : Sipongi.menlhk.go.id)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari terdapat penurunan namun masih ada kejadian setiap tahun. Kejadian besar pada tahun 2015 dan 2019 dipicu oleh kondisi iklim yang mengalami fenomena El-nino sehingga menimbulkan cuaca ekstrim berupa suhu yang tinggi, kelembaban yang rendah, tidak tersedianya embung-embung dan cadangan air dilapangan dan menumpuknya bahan bakaran yang tidak gunakan. Jumlah Hotspot yang tinggi merupakan peringatan dini dan upaya deteksi dini kejadian kebakaran hutan dan lahan. Titik Hotspot dilapangan belum tentu kejadian kebakaran hutan dan lahan, sehingga di perlukan validasi dan *grouncheck* dilapangan untuk memastikan informasi hotspot tersebut serta segera melakukan pemadaman dini jika memang betul terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Banyak hal bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Adinugroho *et al.* (2005) menyebutkan bahwa agar pengendalian kebakaran hutan dapat berhasil dengan baik maka sebelum dilaksanakan perlu disusun suatu rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang menyeluruh, dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Rencana ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penggunaan api secara terkendali di dalam hutan dan di daerah sekitarnya.

Beberapa kelemahan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sendiri meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Kerja sama antara Instansi pemerintah dan swasta masih lemah
2. Sanksi dan hukuman kurang tegas

3. Lemahnya kesadaran pengusaha perkebunan
4. Belum adanya solusi yang mudah dan murah bagi masyarakat dalam menggarap lahan
5. Lemahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga mempengaruhi budaya berladang
6. Beberapa peraturan di tingkat tapak yang tidak sejalan
7. Debit air merosot tajam saat musim kemarau
8. Insentif dan penghargaan/hadiah kepada masyarakat kurang
9. Banyak perusahaan perkebunan belum memiliki sarpras dalkarhutla yang memadai

Untuk mengatasi kelemahan yang ada, maka penelitian ini diperlukan guna melihat *Stakeholder-Stakeholder* yang terlibat dan peranannya dalam pengendalian karhutla di Kabupaten Batang Hari, serta untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan kewajiban *Stakeholder* bidang usaha kehutanan dan perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah yang dapat dijawab pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peranan *Stakeholder* yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban para *Stakeholder* khususnya pelaku usaha Perkebunan dan Kehutanan dalam pengendalian karhutla di Kabupaten Batang Hari

Untuk memenuhi jawaban atas rumusan masalah tersebut dilakukan suatu analisis yang nantinya akan menghasilkan solusi alternatif yang dapat diterapkan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah merumuskan *Stakeholder* terkait dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari, sedangkan secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui peranan *Stakeholder* yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari

2. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban para *Stakeholder* khususnya pelaku usaha Perkebunan dan Kehutanan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari.